

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2008
Yang menyatakan,

Uly Nuzulian
NPM : 0606025166

ABSTRAK

Uly Nuzulian
0606025166
Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi : Studi Kasus
Setelah Perjanjian Sevres Tahun 1920
X + 116 halaman + lampiran
Daftar Pustaka : 20 buku + 10 terbitan berkala + situs website

Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum Kurdi maupun etnis minoritas lain direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi, misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari; lima hari seminggu. Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi sejak tahun 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka.

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kasus yang ditunjang oleh data dokumen, rekaman fisik dan wawancara yang terkait dengan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model interaktif.

Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalahnya dengan etnis Kurdi baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Perubahan konstelasi politik dalam negeri Turki ternyata mempengaruhi kebijakan terhadap etnis Kurdi.

Kata kunci : Kebijakan, Turki, Kurdi



ABSTRACT

Uly Nuzulian

0606025166

Politics and International Relations in the Middle East

The Policies of Turkish Government toward the Kurds: Study Case Post-the Treaty of Sevres of 1920

X + 116 pages + attachment

Bibliography : 20 books + 10 periodical journals + websites

Most of the Turkish government policies toward the Kurds after the Treaty of Sevres in 1920, were adopted from Europe. The consequences of these policies, the Kurds and other minorities in Turkey are oppressed. The Kurds do not have the rights for being active in politic, no adequate access to education, and information. Before 1991, Kurdish language was considered illegal. Up until 1999 the Kurds cannot aired their radio for more than 1 hour in five days a week. The conflicts between the Turkish government and the Kurds happened since 1984. The Turkish government policies towards the Kurds, is caused by the strategic geographic position and the natural wealth of Kurdistan. Especially its natural resources such as water and oil, which is very important for Turkey. 📄

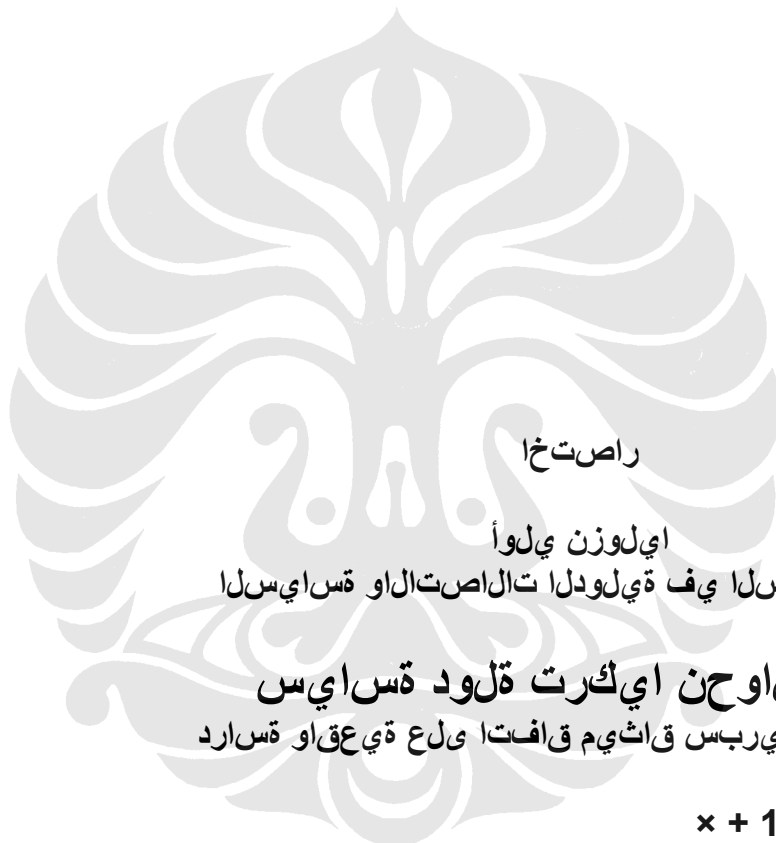
The methods used for this research is a study case methods with qualitative research. All the data used for this research came from documents, physical

records, and interviews. Data analysis methods for this research are qualitative analysis and interactive model.

From the data obtained, it can be seen every efforts that had been done by the Turkish government in order to deal with the Kurdish situations, both by the use of force and through negotiations.

The changing political situation in Turkey also influenced the Turkish government policy toward the Kurds.

Key Words: Policies, Turkey, The Kurds



راصتخا

اي لوزن ي لوأ

طس و أ ل ق ر ش ل ا ي ف ة ي ل و د ل ا ت ا ل ا ص ت ا ل ا و ة س ا ي س ل ا

د ا ر ك أ ل ا و ح ن ا ي ك ر ت ة ل و د ة س ا ي س

1920 م ا ع س ي ر ب س ق ا ث ي م ق ا ف ت ا ي ل ع ة ي ع ق ا و ة س ا ر د

ت ا ق ح ل م + ة ح ف ص 116 + x

ت ي ن ر ت ن إ ل ا ع ق ا و م + ة ت ق و م ت ا ر ا د ص ا 10 + ا ب ا ت ك 20 : ع ج ا ر م ل ا

ق ا ف ت ا د و ج و د ع ب د ا ر ك أ ل ا و ح ن ة ي ل خ ا د ل ا ا ه ت س ا ي س ا ي ك ر ت ة ل و د ت ذ خ أ
ة ر و ص م ل ا ة س ا ي س ل ا ه ذ ه ة ج ي ت ن و , ا ب ر و أ ن م 1920 م ا ع س ي ر ب س ق ا ث ي م
ة ل و د ل ا ا ه ب ق ر ت ة ي ج ر ا خ ل ا و ة ي ل خ ا د ل ا د ا ر ك أ ل ا ة س ا ي س ل ا م ع أ ت ن ا ك ا ب ر و أ ن م
ا و ط ع ي ا ل و ة س ا ي س ل ا ق ح م ه ي د ل ت س ي ل د ا ر ك أ ل ا ف , ة ب ق ا ر م ل ا ل ك ة ي ك ر ت ل ا
1991 م ا ع ل ب ق ن ا ك و , ة ف ا ق ث ل ا و م ي ل ع ت ل ا ل ا ج م ي ف ة ب س ا ن م ل ا ة ص ر ف ل ا
م ا ع ي ل ا ن ا ك م ث ة ي ك ر ت ل ا ة م و ك ح ل ا ي د ل ة ف ر ت ع م د a ر ك أ ل ا ة غ ل ن ك ت م ل

رشن عنم لثم داركأل ادهجاوت ةيميلعت ةيسايس زجاوح دجوت 1999 مويلا يف ةدحاو ةعاس الإ رشنلا عنمي امكو داركأل عايذم ربع رابخأل ةيكرتلا ةلودلا نيب دجاوتملا عارصلنا . عوبسأل يف مايأ ةسمخو وحن ةفينعلا ةيكرتلا ةلودلا ةسايس و . 1984 ماع ذنم شدح داركأل او يتلا دركلا قرش بونج يف ناتسدرك ةليبق دوجوب ةقلعتم داركأل لك ةيكرتلا ةلودلا تصرح اذلو ، ةريفولا ةيندعملا ةورثلا لمحت ةيكرتلا ةدحولا تحت لخاد ناتسدرك نوكت نأ صرحلا عجارملاو ، ةيعقاو ةقيرطب ةيفيكل جهنم ثحبل اذه مدختسي ةيبتملا عجارملا اهيلت ةيخي راتلا ةيعقاو عجارملا يه ةمدختسملا يه ةمدختسملا عجارملا ةيجاهنم ةقيرطو ، ثحبلاب ةقلعتملا تاروحو او . ةيفيكل ةقيرطلا تلواح ةيكرتلا ةلودلا نأ ظحالي ثحبل يف ةدوجوملا عجارملا لالخنمو و اتناك ةيركسع داركأل عم ةيسايسلا اهلكاشم لح يف ةلواحملا لك ةلودلا ةسايس رثوت ةيلخادلا تاسايسلا عقاو تاريغت عمو ، تادهاعم . داركأل وحن ةيكرتلا

درک ، ايكرت ، ةسايسلا : ةيحاتفملا تاملكلا

RINGKASAN EKSEKUTIF

Turki merupakan negara sekuler yang menerapkan sistem politik demokrasi di Timur Tengah. Setelah Perang Dingin berakhir, Turki dipandang negara-negara Barat sebagai oasis kestabilan di tengah-tengah ketidakstabilan negara-negara yang ada di sekitarnya. Namun, ada masalah yang terus-menerus ada dan memunculkan konflik di Turki yaitu masalah dengan etnis Kurdi.

Menyikapi konflik yang muncul dari etnis Kurdi, Pemerintah Turki menerapkan strategi dan kebijakan khusus untuk menghambat tumbuhnya gerakan perjuangan dari etnis Kurdi untuk memerdekakan diri di antaranya dengan melarang penggunaan bahasa dan juga budaya Kurdi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus di Turki, dengan adanya kebijakan khusus kepada etnis Kurdi misalnya ada pelarangan penggunaan bahasa dan budaya Kurdi di Turki yang tercantum dalam perubahan Konstitusi Turki Bab III pasal 42 membawa dampak bagi hubungan keduanya. Tidak diakuinya eksistensi Kurdi di Turki dengan konsekuensi populasinya cukup besar di Turki dimana etnis Kurdi menempati posisi kedua terbesar jumlah populasinya di Turki dapat memunculkan konflik di antara keduanya

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi?
2. Faktor konflik apa saja yang ada antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi serta bagaimana konflik terjadi?
3. Bagaimana prospek hubungan kedua belah pihak di masa depan?

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah dengan cara menyimpulkan dari sejumlah pengetahuan dan data yang ada. Berdasarkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Identifikasi kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi serta bagaimana konflik itu terjadi.
3. Untuk mengetahui prospek hubungan kedua belah pihak di masa depan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti membatasi obyek masalah penelitian adalah mengenai interaksi pemerintah Turki dengan etnis Kurdi khususnya kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi setelah adanya perjanjian Sevres tahun 1920 dan melihat dampaknya terhadap hubungan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan kebijakan itu dapat memunculkan konflik kepentingan berupa kepentingan politik, ekonomi serta

masalah sosial budaya yang pada akhirnya memunculkan konflik fisik dimana konflik dengan etnis Kurdi merupakan konflik yang laten terjadi di Turki dan sampai sekarang konfliknya belum menemukan suatu resolusi terbaik.

Ada tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen, rekaman fisik dan wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain draf perjanjian Sevres tahun 1920 yang menjamin pemberian otonomi yang luas bagi etnis Kurdi dan memberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, Konstitusi Turki tahun 1920, 1961, 1982, dan 2001, UU tentang pelarangan penggunaan bahasa Kurdi dalam perubahan Konstitusi Turki Bab III pasal 42, dan lain-lain. Data dokumen disini lebih banyak merupakan data dokumen eksternal, yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial maupun lembaga lain yang memiliki keterhubungan dengan fokus masalah penelitian melalui buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian, majalah, buletin, koran dan sumber informasi tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Rekaman fisik yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta pembagian wilayah Turki setelah perjanjian Sevres, peta wilayah-wilayah yang didiami etnis Kurdi, data demografi Turki dan lain-lain. Sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dan via email (*print out* email terlampir), dengan narasumber Tulay Savli dari Kedutaan Besar Turki di Indonesia.

Tesis ini menggunakan metode studi kasus dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi literatur terhadap berbagai buku-buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar, hasil-hasil penelitian, data dari internet berupa *homepage* institusi terkait maupun data *online* buku dan jurnal serta sumber informasi tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum Kurdi direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi

(misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari, lima hari seminggu). Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi semenjak 15 Agustus 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka.

Sumber konflik antara Pemerintah Turki dengan etnis Kurdi antara lain posisi Turki dalam mempertahankan hak teritorialnya atas keinginan-keinginan separatis Kurdi dalam memperoleh wilayah sendiri, ancaman terhadap integritas negara yang muncul dari upaya-upaya pemberontakan dari *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK), persaingan militer *vis-à-vis* pemerintahan sipil dalam kancah politik Turki yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap etnis Kurdi, kesenjangan pembangunan di Turki Tenggara, kebijakan-kebijakan pemerintah Turki yang mengeliminir identitas selain Turki termasuk kepada etnis Kurdi, adanya kekerasan atau tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk mewujudkan tertib sosial secara cepat terhadap etnis Kurdi separatis, intervensi asing atas konflik yang berawal dari penguasaan sumber daya alam yaitu sumber daya alam di Kurdistan.

Konflik yang muncul berupa konflik bersenjata dimulai tahun 1984 ketika PKK mengumumkan perang gerilya untuk merespons tekanan-tekanan Pemerintah Turki. Hingga awal Februari 2008 korban tewas mencapai sekitar 40 ribu orang. Dalam rangka konflik dengan etnis Kurdi, Pemerintah Turki melakukan penghentian secara paksa konflik yang terjadi antara lain dengan melaksanakan operasi militer. Selain dengan melakukan penggunaan *force* dan ancaman dalam menyikapi konflik yang ada dengan etnis Kurdi, Turki juga berupaya mencapai penyelesaian damai melalui pendekatan politik dan diplomasi. Prospek hubungan kedua belah pihak akan menjadi lebih baik dengan cara meningkatkan komunikasi, toleransi, dialog serta pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas. Ada beberapa perubahan kebijakan ketika Abdullah Gul menjadi Presiden Turki di akhir tahun 2007. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan pemerintahan Partai Keadilan

dan Pembangunan (AKP) membuka lebih banyak kesempatan bagi ekspresi kebebasan etnis Kurdi di Turki. Pemerintahan AKP memperbolehkan kemunculan koran, radio, dan televisi berbahasa Kurdi. Kebijakan AKP diarahkan untuk mengakomodasi perbedaan daripada menghapus perbedaan dalam baju keseragaman yang telah lama menjadi pendekatan resmi pemerintah Turki. Erdogan juga menerapkan kebijakan berorientasi kemakmuran dimana investasi dipompa ke daerah tertinggal, termasuk kawasan Kurdi di tenggara Turki. Pemerintah Turki juga sudah mengakomodir orang-orang Kurdi dengan adanya keterwakilan mereka di parlemen dan diberi otonomi khusus di wilayah yang berbatasan dengan sebelah Utara Irak. Masalah Kurdi terbukti lebih mungkin terselesaikan dengan pendekatan politik dan ekonomi ketimbang senjata.

Penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia dengan metode kualitatif, maka akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dilakukan secara langsung di Turki maupun di wilayah lain seperti Irak, Iran dan Suriah yang wilayahnya ditempati etnis Kurdi. Dengan melakukan penelitian partisipatif atau terjun langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat sehingga dapat membandingkan dengan gambaran yang terdapat dalam dokumen, buku atau jurnal yang tersedia.

Metode yang digunakan juga akan lebih baik jika menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang ada.